

Bab I

Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Keuangan Pemerintah, antara lain:

- (a) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- (b) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);

- (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2007 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- (d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 Pasal 184 ayat (1) dan (3) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- (e) Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- (f) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5165
- (g) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- (h) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25)
- (i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

1.3. Sistematika Penulisan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Adapun Sistematika isi Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.2. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3. Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan keuangan
- Bab II Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.1. Kebijakan Keuangan
 - 2.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
 - 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
 - 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- Bab IV Kebijakan akuntansi
 - 4.1. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.2. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
 - 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.2. Neraca

Bab II
Kebijakan Keuangan
dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1. Kebijakan Keuangan

Dalam Penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, beberapa arah dan kebijakan keuangan yang ditempuh antara lain:

- 1) Arah dan kebijakan umum bagian pendapatan
 - a. Mengevaluasi Peraturan Daerah yang mengatur pendapatan sesuai kondisi di lapangan
 - b. Mengoptimalkan sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sesuai potensi yang ada
 - c. Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
 - d. Mengembangkan koordinasi secara sinergis antara satuan kerja terkait di bidang pendapatan daerah
- 2) Arah dan kebijakan umum bagian belanja
 - a. Belanja daerah diupayakan untuk peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
 - b. Belanja daerah pada tiap kegiatan disertai tolok ukur dan target kinerjanya
 - c. Belanja daerah dialokasikan untuk melaksanakan program, kegiatan sesuai dengan perencanaan strategis masing-masing satuan kerja dan mengakomodasikan nilai-nilai yang berkembang dalam situasi yang berubah (dinamis)
 - d. Belanja daerah dialokasikan secara efisien dan efektif mewujudkan sasaran kinerja
- 3) Arah dan kebijakan umum bagian pembiayaan
 - a. Penerimaan pembiayaan diupayakan berasal dari jenis penerimaan yang tidak membebani daerah
 - b. Pengeluaran pembiayaan diupayakan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah serta memenuhi kewajiban daerah yang segera harus dipenuhi.
 - c. Pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan pembayaran hutang yang harus diselesaikan

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Berdasarkan kondisi dan permasalahan pembangunan Kabupaten Badung maka Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung adalah Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah di Kabupaten Badung

Sedangkan sasaran itu sendiri merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 tahun melalui tindakan-tindakan yang memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dicapai.

Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung adalah ;

1. Meningkatnya Luas Sawah Beririgasi
2. Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Air Minum dan Sanitasi Yang Layak dan Aman Meningkatnya dukungan untuk kedaulatan pangan dan ketahanan air.
3. Terwujudnya Bangunan Gedung yang Laik Fungsi
4. Meningkatnya Kemantapan Jalan Kabupaten.
5. Terpenuhinya penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Detail Tata Ruang.
6. Terkendalinya Pengawasan Pemanfaatan Ruang.
7. Meningkatnya Pembinaan Jasa Konstruksi
8. Meningkatnya Tata Kelola Perkantoran Yang Akuntabel

Bab III
Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan.

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian Kinerja Keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja. Berikut disajikan gambaran Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	2022			2021		
		Anggaran setelah Perubahan	REALISASI	%	Anggaran setelah Perubahan	REALISASI	%
1.	PENDAPATAN	65,000,000.00	28,253,646.41	43.47	189,500,000.00	1,114,665,451.13	588.21
2.	BELANJA	661,515,118,594.00	608,218,645,279.00	91.94	155,783,871,775.00	141,604,508,906.75	90.90
3.	SURP/(DEF))	(661,450,118,594.00)	(608,190,391,632.59)	91.95	(155,594,371,775.00)	(140,489,843,455.62)	90.29

Pendapatan Tahun Anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp. 65.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.28.253.646,41 dengan rincian sebagai berikut :

Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp.	10.550.000,00
Terdiri : Retribusi Pemakaian Laboratorium	Rp.	10.550.000,00
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	Rp.	0,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar	Rp.	17.703.646,41
dengan rincian : Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	Rp.	7.025.000,00
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	Rp.	584.288,53
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	Rp.	10.094.357,88

Pada Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan pembangunan dialokasikan anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 661.515.118.594,00 terealisasi Rp. 608.218.645.279,00 atau 91,94 %.

Capaian bagian belanja sebesar 91,94 % terinci untuk masing-masing belanja sebagai berikut:

Belanja Operasi, target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 323.600.011.251,00 terealisasi sebesar Rp 302.850.323.919,00 atau 93,59 %.

Belanja Modal target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 337.915.107.343,00 terealisasi sebesar Rp. 305.368.321.360,00 atau 90,37 %. Realisasi anggaran belanja sebesar Rp. 608.218.645.279,00 di atas digunakan untuk membiayai pelaksanaan program-program di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung yang terinci sebagai berikut :

No	PROGRAM	TAHUN 2022			TAHUN 2021		%
		Anggaran Setelah Perubahan	REALISASI	%	Anggaran Setelah Perubahan	REALISASI	
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	31,030,222,016.00	23,437,541,382.00	75.53	21,480,167,038.00	18,708,707,152.00	87.10
	2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	20,627,399,462.00	18,090,666,577.00	87.70	8,053,639,219.00	6,304,110,771.00	78.28
	3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	4,098,485,913.00	3,747,940,356.00	91.45	0.00	0.00	#DIV/0!
	4. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1,280,273,360.00	604,752,757.00	47.24	17,281,530,541.00	16,334,101,727.00	94.52
	7. Program Pengembangan Permukiman	263,488,562,160.00	249,266,628,937.00	94.60	0.00	0.00	#DIV/0!
	8. Program Penataan Bangunan Gedung	58,574,719,733.00	52,990,734,240.00	90.47	75,868,348,329.00	74,240,115,566.00	97.85
	9. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	199,207,790,034.00	195,674,923,599.00	98.23	644,648,204.00	640,906,564.00	99.42
	10. Program Penyelenggaraan Jalan	80,611,701,723.00	62,121,331,048.00	77.06	29,685,898,317.00	23,266,674,093.75	78.38
	11. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	737,392,195.00	636,404,497.00	86.30	957,779,762.00	766,513,361.00	80.03
	12. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1,858,571,998.00	1,647,721,886.00	88.66	1,811,860,365.00	1,343,379,671.00	74.14
	J U M L A H	661,515,118,594.00	608,218,645,279.00	91.94	155,783,871,775.00	141,604,508,905.75	90.90

Rincian penggunaan belanja langsung untuk setiap kegiatan dapat dilihat pada lampiran.

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

1. Di dalam pelaksanaan kegiatan masih terdapat beberapa rekanan penyedia jasa konstruksi yang belum dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang tertuang di dalam kontrak dengan berbagai kendala yang dihadapi oleh pihak penyedia jasa konstruksi diantaranya penyediaan dan mobilisasi tenaga kerja yang kurang memadai dan manajemen kerja yang masih belum optimal .
2. Adanya pengaruh cuaca dan iklim yang menghambat di dalam penyelesaian pekerjaan

Bab IV

Kebijakan Akuntansi

4.1. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kabupaten Badung Tahun 2022 adalah akuntansi berbasis akrual

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya sehingga dapat menyajikan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

4.2. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

A. NERACA

I. ASET LANCAR

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi.

1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/ dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank

maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

1.3. Belanja dibayar di muka

Belanja dibayar di muka merupakan penurunan aktiva yang digunakan untuk uang muka pembelian barang atau jasa dan belanja yang maksud penggunaannya akan dipertanggungjawabkan kemudian.

1.4. Piutang Pajak

Piutang pajak adalah merupakan piutang atas pajak-pajak daerah yang dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima. Piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi.

1.5. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum terbayar sebesar nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi berdasarkan bukti penetapan retribusi. Perkiraan piutang retribusi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi.

1.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

1.7. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Dokumen sumber TGR adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Majelis Pembebanan TP/TGR. Dalam hal Surat Keputusan tersebut terlambat atau tidak diterbitkan, dokumen sumber untuk Piutang TGR diperoleh dari hasil pemeriksaan APFP.

1.8. Piutang Lainnya

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar

Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Pajak. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

1.9. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

II. ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan.

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva tang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

2.1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Biaya ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan.

2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak

kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan.

2.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, Irigasi, Jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Harga perolehan jalan, irigasi, jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai Jalan, Irigasi, Jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan.

2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga. Aset tetap lainnya dicatat

sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasi sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

2.7. Akumulasi Penyusutan

Depresiasi / penyusutan atas Aktiva Tetap merupakan pengalokasian harga perolehan dari suatu aktiva tetap karena adanya penurunan nilai aktiva tetap tersebut. Nilai aktiva tetap akan menjadi turun apabila sudah dipakai atau digunakan dalam periode tertentu.

III. ASET LAINNYA

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Aset Lain-lain.

3.1. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

3.2. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Aset Lain-lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan sebesar nilai perolehannya.

IV. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

4.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pungutan/potongan PFK dapat berupa potongan/pungutan Iuran Taspen, Bapertarum, Askes, juga termasuk pajak-pajak pusat. Perkiraan ini dicatat sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong berdasarkan nilai nominal.

4.2. Uang Muka Kas Daerah

Merupakan saldo Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan tanggal Neraca. Perkiraan ini merupakan perkiraan timbal balik (reciprocal) yang akan dieliminasi pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi.

4.3. Pendapatan Ditangguhkan

Merupakan saldo uang yang diterima oleh Bendahara Penerimaan dari wajib pajak dan wajib retribusi yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan tanggal Neraca.

Perkiraan ini merupakan perkiraan timbal balik (reciprocal) yang akan dieliminasi pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi.

4.4. Hutang Jangka Pendek Lainnya

Hutang jangka pendek lainnya, yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu hutang jangka pendek diatas, adalah kewajiban yang harus dilunasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung dan penambahan aset yang diperoleh dari penerimaan hak yang belum saatnya diterima dan akan dipertanggungjawabkan kemudian. Hutang jangka pendek lainnya dibukukan sebesar nilai nominal.

V. EKUITAS DANA

Ekuitas Dana merupakan pos pada neraca pemerintah yang menampung selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Pos Ekuitas Dana terdiri dari tiga kelompok, yaitu Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

5.1. EKUITAS DANA LANCAR

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar terdiri dari Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan, Cadangan Aset Lancar Lainnya dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

5.2. EKUITAS DANA INVESTASI

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini terdiri dari:

- a) Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun lawan dari Aset Tetap.
- b) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun lawan Aset Lainnya.

B. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak daerah. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada Kas Daerah. Pencatatan pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan seluruhnya merupakan Pendapatan Asli Daerah. Pengembalian atau koreksi atas pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan maupun periode sebelumnya, dicatat sebagai pengurang pendapatan.

II. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi beban daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu : belanja operasi dan belanja modal. Belanja Operasi diklasifikasikan atas : belanja pegawai dan belanja barang. Belanja modal diklasifikasikan atas : belanja tanah, belanja peralatan & mesin, belanja gedung & bangunan, belanja jalan, irigasi & jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

Bab V
Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 PENDAPATAN DAERAH

Jumlah Pendapatan Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung dalam Tahun Anggaran 2022 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar

Rp.65.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 12.994.397,05 Realisasi pendapatan ini bersumber dari pendapatan asli daerah yang terdiri dari

Retribusi Daerah meliputi :

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp.	3.070.000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah :	Rp.	<u>9.924.397,05</u>
Terdiri : Hasil Penjualan Aset Lainnya	Rp.	7.025.000,00
Jasa Giro pada Kas di Bendahara	Rp.	329.080,54
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	Rp.	2.570.316,51

Seluruh pendapatan daerah tersebut merupakan Pendapatan Daerah pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung .

1. Pendapatan Daerah

Target Anggaran setelah perubahan sebesar Rp 65.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 28.253.646,41 Rincian atas jumlah Pendapatan Daerah tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021		
		Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	%	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	%
1	Retribusi Daerah	40,000,000.00	10,550,000.00	26.38	164,500,000.00	24,575,000.00	14.94
2	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	25,000,000.00	17,703,646.41	70.8	25,000,000.00	1,090,090,451.13	4,360.4
<i>Jumlah</i>		<i>65,000,000.00</i>	<i>28,253,646.41</i>	<i>43.47</i>	<i>189,500,000.00</i>	<i>1,114,665,451.13</i>	<i>588.21</i>

Besarnya realisasi pendapatan dari Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan dengan penerimaan sebesar Rp. 10.550.000,00 dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2021 dengan penerimaan sebesar Rp 24.575.000,00. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut

Penjelasan untuk realisasi dibawah target atas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah :

1. Pada tahun 2022, alat berat yang ada pada Dinas PUPR Kab. Badung kebanyakan melayani kegiatan Swadaya Masyarakat dan Swakelola, dari pihak swasta tidak ada yang menyewa alat berat yang ada pada Dinas PUPR Kab. Badung.
2. Retribusi pemakaian kekayaan daerah dari hasil uji mutu material konstruksi berpatokan pada kegiatan-kegiatan fisik Dinas PUPR Kab. Badung khususnya pada kegiatan peningkatan jalan pada bidang binamarga, peningkatan saluran irigasi pada bidang sumber daya air dan keg pembangunan fisik yang ada pada bidang cipta karya.

Memperhatikan kondisi, jumlah dan nilai kegiatan pada bidang-bidang tersebut pada tahun 2022 menurun maka secara otomatis pengujian mutu konstruksi juga mengalami penurunan yang berdampak pada penurunan realisasi dari target yg telah ditentukan sebelumnya

Penurunan pendapatan ini juga disebabkan adanya penurunan pendapatan dari lain lain pendapatan asli daerah yang sah.

Gambaran angka realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara terperinci adalah sebagai berikut:

1.1) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp.40.000.000,00 realisasi penerimaan sebesar Rp. 10.550.000,00. Realisasi tersebut merupakan 37,34 % dari realisasi Pendapatan Daerah secara keseluruhan.

Rincian atas penerimaan retribusi daerah tersebut sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021		
		Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	%	Anggaran setelah Perubahan	Rp	%
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	0.00	0	-	0.00	0
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Lab	40,000,000.00	10,550,000.00	26.375	40,000,000.00	24,575,000.00	61.4375
<i>Jumlah</i>		40,000,000.00	10,550,000.00	26.375	40,000,000.00	24,575,000.00	61.4375

Dari uraian di atas pendapatan dari retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan yang disebabkan oleh pemakaian alat dari laboratorium mengalami penurunan.

1.2) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp.25.000.000,00. Realisasi penerimaan sebesar Rp. 17.703.646,41 Realisasi tersebut merupakan 62,65 % dari realisasi Pendapatan Daerah secara keseluruhan.

Rincian atas penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun Anggaran 2022			Tahun Anggaran 2021		
		Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	%	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	%
1	Jasa Giro	-	584,288.53	#DIV/0!	-	578,035.92	#DIV/0!
2	Penjualan drum	25,000,000.00	7,025,000.00	28.10	25,000,000.00	15,075,000.00	60.30
3	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan	-	10,094,357.88	#DIV/0!	-	1,068,190,994.21	#DIV/0!
5	Pendapatan dari Pengembalian	-	0.00	#DIV/0!	-	6,246,421.00	#DIV/0!
<i>Jumlah</i>		25,000,000.00	17,703,646.41	70.81	25,000,000.00	1,090,090,451.13	4,360.36

Realisasi Pendapatan diatas merupakan realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pada Tahun Anggaran 2022 lain lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami penurunan yang sangat banyak. Terutama pendapatan dari denda atas keterlambatan pelaksanaan dan bahkan pendapatan dari pengembalian tidak terealisasi.

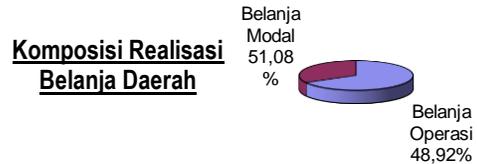
Pendapatan dari denda atas keterlambatan pelaksanaan, dan pendapatan dari pengembalian tidak dianggarkan karena pendapatan ini bukan merupakan kegiatan usaha yang bisa diperkirakan

hasilnya dan ini merupakan pendapatan yang tidak terduga akibat dari pelaksanaan kegiatan

5.1.2 BELANJA DAERAH

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran satuan kerja.

Belanja daerah dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 661.515.118.594,00 realisasinya sebesar Rp 608.218.645.279,00 atau 91,94 %. Rincian atas jumlah belanja tersebut sebagai berikut:



No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021		
		Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	%	Anggaran setelah Perubahan	Rp	%
1	Belanja Operasi	323,600,011,251.00	302,850,323,919.00	93.59	109,824,029,984.00	101,094,372,486.35	92.05
2	Belanja Modal	337,915,107,343.00	305,368,321,360.00	90.37	45,959,841,791.00	40,510,136,420.40	88.14
<i>Jumlah</i>		661,515,118,594.00	608,218,645,279.00	91.94	155,783,871,775.00	141,604,508,906.75	90.90

1. Belanja Operasi

Target anggaran setelah perubahan sebesar Rp.323.600.011.251,00 terealisasi sebesar Rp.302.850.323.919,00 atau 93,59 %. Realisasi tersebut merupakan 49,79 % dari realisasi belanja daerah secara keseluruhan. Rincian atas jumlah Belanja Operasi sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021		
		Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	%	Anggaran setelah Perubahan	Rp	%
1	Belanja Pegawai	19,152,468,455.00	16,566,184,595.00	86.50	16,535,073,714.00	16,204,550,186.00	98.00
2	Belanja Barang	57,643,411,162.00	47,651,259,125.00	82.67	34,088,487,451.00	26,726,910,537.75	78.40
3	Belanja Hibah	246,804,131,634.00	238,632,880,199.00	96.69	59,200,468,819.00	58,162,911,762.60	98.25
<i>Jumlah</i>		323,600,011,251.00	302,850,323,919.00	93.59	109,824,029,984.00	101,094,372,486.35	92.05

1.a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 19.152.468.455,00 realisasi pengeluaran sebesar Rp. 16.566.184.595,00 atau 86,50 %. Realisasi tersebut merupakan 5,47 % dari realisasi belanja operasi secara keseluruhan . Dengan rincian sebagai berikut

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021		
		Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	%	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	%
1	Belanja Operasional (Belanja Pegawai)				Belanja Tidak Langsung		
1	Gaji dan Tunjangan	8,899,467,574.00	7,773,305,671.00	87.35	8,324,541,684.00	8,248,251,062.00	99.08
2	Tambahan Penghasilan PNS	10,230,329,881.00	8,792,878,924.00	85.95	8,210,532,030.00	7,956,299,124.00	96.90
3	Insentif Pemungutan Retribusi	22,671,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	Jumlah	19,152,468,455.00	16,566,184,595.00	86.50	16,535,073,714.00	16,204,550,186.00	98.00

1.b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang pada Tahun Anggaran 2022 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 57.643.411.162,00 dengan realisasi sebesar Rp. 47.651.259.125,00 atau 82,67% Realisasi tersebut merupakan 15,73% dari belanja operasi secara keseluruhan ., dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	Tahun 2022			Tahun 2021		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	Belanja Bhn Pakai Habis	1,013,101,944.00	724,543,689.00	71.52	2,843,298,062.05	2,091,640,124.00	73.56
2	Belanja Bahan /Material	6,833,597,650.00	5,995,068,906.00	87.73			#DIV/0!
3	Belanja Jasa Kantor	18,996,008,627.00	17,536,864,458.00	92.32	15,533,149,976.95	14,011,160,469.00	90.20
4	B Pemeliharaan Alat Besar	1,666,205,950.00	252,550,262.00	15.16			#DIV/0!
5	B. Pemeliharaan Alat Angkutan	1,844,332,500.00	895,767,365.00	48.57			#DIV/0!
6	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	7,318,828,160.00	5,725,255,782.00	78.23	2,941,653,094.00	2,009,630,889.00	68.32
7	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1,048,915,557.00	840,723,888.00	80.15	252,494,900.00	243,237,700.00	96.33
8	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat			####	30,000,000.00	-	
9	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5,072,960,667.00	4,650,203,720.00	91.67			
10	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	21,000,000.00	19,029,285.00	90.62	23,100,000.00	9,927,300.00	
11	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12,294,339,295.00	9,686,828,929.00	78.79	9,224,641,332.00	7,142,788,543.75	
12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	71,590,000.00	70,276,900.00	98.17	2,546,214,539.00	628,813,542.00	
13	B. Premi Asuransi	392,775,864.00	339,084,673.00	86.33	311,125,064.00	299,559,970.00	96.28
14	Belanja Pemeliharaan Komputer	34,000,000.00	22,871,200.00	67.27			#DIV/0!
15	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium	108,484,880.00	45,466,256.00	41.91			#DIV/0!
16	B. Perjalanan Dinas			####	65,350,483.00	19,152,000.00	29.31
17	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin				317,460,000.00	217,000,000.00	
18	B. Pemeliharaan Jaringan Telepon	6,000,000.00		-			#DIV/0!
19	Belanja Pipa	17,502,826.00	17,482,500.00	99.88			#DIV/0!
20	B. Jasa Konsultansi	-	-	####			#DIV/0!
21	Belanja Pakaian	121,354,882.00	113,732,512.00	93.72			-
22	B. Sewa Sarana Mobilitas	6,660,000.00	6,660,000.00	###			
23	B. Sewa Alat Berat	775,752,360.00	708,848,800.00	91.38			
	Jumlah	57,643,411,162.00	47,651,259,125.00	82.67	34,088,487,451.00	26,672,910,537.75	78.25

1.c) Belanja Hibah

Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2022 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 246.804.131.634,00 dengan realisasi sebesar 238.632.880.199,00 atau 96,69% Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2021 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 59.200.468.819 dengan realisasi sebesar 58.162.911.762,6 atau 98,25% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021		
		Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	%	Anggaran setelah Perubahan	Rp	%
1	Hibah Kepada Kelompok Masyarakat	-	0.00	0.00	27,498,494,919.83	23,371,390,196.68	84.99
2	Hibah Barang	48,619,618,834.00	43,879,367,399.00	90.25	1,410,000,000.00	98,167,000.00	6.96
3	Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan	198,184,512,800.00	194,753,512,800.00	98.27	0.00	0.00	0.00
<i>Jumlah</i>		246,804,131,634.00	238,632,880,199.00	96.69	28,908,494,919.83	23,469,557,196.68	81.19

Rincian kegiatan belanja hibah kepada masyarakat beserta realisasinya ada pada lampiran Catatan Akhir Laporan Keuangan ini

2. Belanja Modal

Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2022 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 337.915.107.343,00 realisasi sebesar Rp. 305.368.321.360,00 atau 90,37% Dan realisasi tersebut 50,20% dari belanja daerah secara keseluruhan . Tahun Anggaran 2021 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 45.959.841.791,00 realisasi sebesar Rp. 40.510.136.420,40 atau 88,14% Dan realisasi tersebut 28,60% dari belanja daerah secara keseluruhan, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021		
		Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	%	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	%
1	Tanah	34,807,570,000.00	23,707,768,000.00	68.11	-	-	#DIV/0!
2	Peralatan dan Mesin	6,790,472,320.00	4,475,187,335.00	65.90	917,947,674.00	318,255,000.00	34.67
3	Gedung dan Bangunan	268,191,374,061.00	254,009,806,563.00	94.71	31,288,536,277.00	30,664,440,359.00	98.01
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	28,125,690,962.00	23,175,559,462.00	82.40	13,753,357,840.00	9,527,441,061.40	69.27
<i>Jumlah</i>		337,915,107,343.00	305,368,321,360.00	90.37	45,959,841,791.00	40,510,136,420.40	88.14

Belanja Modal secara terperinci adalah sebagai berikut:

2.1) Belanja Tanah

Belanja Tanah pada Tahun Anggaran 2022 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 34.807.570.000,00 dengan realisasi pengeluaran Rp. 23.707.768.000,00 atau 68,11 % dan realisasi tersebut merupakan 7,76 % dari realisasi belanja modal secara keseluruhan. Dan Belanja Tanah pada Tahun Anggaran 2021 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp 0.00 dengan realisasi pengeluaran Rp. 0,00 atau 0 % dan realisasi tersebut merupakan 0 % dari realisasi belanja modal secara keseluruhan.

2.2) Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2022 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 6.790.472.320,00 dengan realisasi pengeluaran sebesar Rp. 4.475.187.335,00 atau 65,90% . Realisasi tersebut merupakan 1,47% dari belanja modal secara keseluruhan. Pada Tahun Anggaran 2021 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 917.947.674,00 dengan realisasi pengeluaran sebesar Rp. 318.255.000,00 atau 34,67% . Realisasi tersebut merupakan 00,78% dari belanja modal

secara keseluruhan..

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021		
		Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	%	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	%
1	Belanja Modal Alat Pendingin	101,967,857.00	89,577,000.00	87.85	-	-	-
2	B.M Pengadaan Excavator	1,230,743,580.00	1,207,000,000.00	98.07	-	-	-
3	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	83,605,897.00	38,399,295.00	45.93	-	-	-
4	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	13,140,600.00	12,853,800.00	97.82	-	-	-
5	Belanja Modal Peralatan Permainan	197,000,000.00	196,000,000.00	99.49	-	-	-
6	Belanja Modal Personal Computer	69,442,501.00	-	-	-	-	-
7	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	9,897,288.00	-	-	-	-	-
8	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	3,712,113.00	3,711,840.00	99.99	-	-	-
9	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	82,856,300.00	43,039,140.00	89.68	-	-	-
10	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	66,554,218.00	49,500,000.00	74.38	-	-	-
11	Belanja Modal Alat Ukur	2,760,000.00	-	-	26,129,700.00	-	-
12	Belanja Modal Alat Besar Darat	4,044,368,250.00	2,035,000,000.00	50.32	173,158,000.00	163,680,000.00	94.53
13	Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	-	-	-	83,500,000.00	-	-
14	Belanja Modal Alat Bantu	-	-	-	154,850,000.00	154,575,000.00	99.82
15	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	-	-	-	202,562,400.00	-	-
16	Belanja Modal Alat Studio	-	-	-	15,999,000.00	-	-
17	Belanja Modal Komputer Unit	808,745,845.00	725,263,400.00	89.68	53,150,000.00	-	-
18	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	75,677,871.00	74,842,860.00	98.90	35,848,574.00	-	-
19	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	-	-	-	172,750,000.00	-	-
<i>Jumlah</i>		6,790,472,320.00	4,475,187,335.00	65.90	917,947,674.00	318,255,000.00	34.67

2.3) Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2022 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 268.191.374.061,00 realisasi pengeluaran Rp. 254.009.806.563,00 atau 94,71% . Realisasi tersebut merupakan 83,18% dari belanja modal secara keseluruhan

Belanja Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2021 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 31.288.536.277,00 realisasi pengeluaran Rp. 30.664.440.359,00 atau 98,00% . Realisasi tersebut merupakan 75,77% dari belanja modal secara keseluruhan

NO	URAIAN	TAHUN 2022			TAHUN 2021		
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	Peng. Bang Gd Kantor	3,362,126,379.00	2,943,766,465.00	87.56	-	-	#DIV/0!
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	262,971,330.00	255,715,606.00	97.24	-	-	#DIV/0!
3	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pas	263,712,267,684.00	250,031,504,307.00	94.81	-	-	#DIV/0!
4	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	254,023,398.00	249,405,674.00	98.18			
5	Belanja Modal Pagar	599,985,270.00	529,414,511.00	88.24			
6	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja			-	30,988,285,612.00	30,443,024,359.00	0
7	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas				300,250,665.00	221,416,000.00	0
	Jumlah	268,191,374,061.00	254,009,806,563.00	94.71	31,288,536,277.00	30,664,440,359.00	98.005

2.4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun Anggaran 2022 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 28.125.690.962,00 dengan realisasi sebesar Rp 23.175.559.462,00 atau 82,40% . Realisasi tersebut merupakan 7,58 % dari realisasi belanja modal secara keseluruhan. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun Anggaran 2021 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 13.753.357.840,00 dengan realisasi sebesar Rp 9.527.441.061.4 atau 69,27% . Realisasi tersebut merupakan 23,51 % dari realisasi belanja modal secara keseluruhan.

No	Uraian	Tahun 2021			Tahun 2020		
		Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	%	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	%
1	B M Peng Konstruksi Jalan	11,781,932,840.00	8,200,637,324.00	69.60	10,698,000,000.00	8,060,600,778.86	75.35
2	B M Peng Konst. Jaringan Air	1,971,425,000.00	1,326,803,737.40	67.30	16,003,098,629.50	10,409,709,043.00	65.05
	<i>Jumlah</i>	13,753,357,840.00	9,527,441,061.40	69.27	26,701,098,629.50	18,470,309,821.86	69.17

2.5) Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya pada Tahun Anggaran 2022 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 0,00 realisasi pengeluaran Rp. 0,00 atau 0,00% . Realisasi tersebut merupakan 0,00 % dari realisasi belanja modal secara keseluruhan.

Tahun Anggaran 2021 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 0,00 realisasi pengeluaran Rp. 0,00 atau 0,00% . Realisasi tersebut merupakan 0,00 % dari realisasi belanja modal secara keseluruhan.

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021		
		Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	%	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	%
1	B.M Peng Buku / Kepustakaan	-	-	####	-	-	#DIV/0!
2	Belanja Modal Pengadaan Tanaman Hias	-	-	-	-	-	-
<i>Jumlah</i>		-	-	####	-	-	#DIV/0!

2.6) Belanja Aset Lainnya

Belanja Aset Lainnya dengan target anggaran setelah perubahan sebesar *Rp.0,00* realisasi pengeluaran sebesar *Rp.00,00* atau *00,00 %*. Realisasi tersebut merupakan *00,00%* dari realisasi belanja modal secara keseluruhan.

5.2 NERACA

5.2.1 ASET

1) ASET LANCAR

a) Kas di Bendahara Pengeluaran

Rp 0,00

Jumlah kas pada Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 adalah Rp. 0,00 :

RINCIAN		TAHUN 2022	TAHUN 2021
Bank Pembangunan Daerah Cabang Badung No.Rekening 009.01.05.00202-0	Rp	0,00	0,00
Uang Tunai	Rp	0,00	0,00
Jumlah	Rp	0,00	0,00

b) Kas di Bendahara Penerimaan

Rp 00,00

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas pada Bendahara Penerimaan per Tanggal 31 Desember 2022 yang belum disetor ke Kas Daerah , yang terdiri dari :

RINCIAN		TAHUN 2022	TAHUN 2021
Uang Tunai	Rp	0,00	0,00
Jumlah	Rp	0,00	0,00

c) Belanja Dibayar di Muka

Rp 00,00

Belanja Dibayar di Muka adalah uang muka kerja kepada pihak ketiga (rekanan) yang belum dipertanggungjawabkan melalui penyelesaian fisik pekerjaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, yang terdiri dari :

	Tahun 2022	Tahun 2021
- (Uraian Jenis Aset Tetap ybs dan lokasinya)	Rp0,00	Rp. 0,00
Jumlah	Rp0,00	Rp. 0,00

d) Piutang Pajak **Rp 00,00**

Jumlah tersebut merupakan kewajiban para wajib pajak daerah yang sudah ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak Rampung, tetapi sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 belum dilunasi, dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN		TAHUN 2022	TAHUN 2021
- Pajak Kendaraan Bermotor	Rp	00,00	0,00
- Pajak Kendaraan Di Atas Air	Rp	00,00	0,00
- Pajak Air Permukaan	Rp	00,00	0,00
Jumlah	Rp	00,00	0,00

e) Piutang Retribusi **Rp 00,00**

Jumlah tersebut merupakan kewajiban para wajib retribusi yang sudah ditetapkan dengan Surat Ketetapan Retribusi, tetapi sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 belum dilunasi, dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN		TAHUN 2022	TAHUN 2021
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp	00,00	0,00
Jumlah	Rp	00,00	0,00

f) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran **Rp 00,00**

Jumlah tersebut merupakan bagian lancar penjualan angsuran yang akan jatuh tempo pada Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN		TAHUN 2022	TAHUN 2021
- Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran Cicilan Kendaraan Bermotor	Rp	00,00	0,00
Jumlah	Rp	00,00	0,00

g) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah **Rp 00,00**

Jumlah tersebut merupakan bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang akan jatuh tempo pada Tahun Anggaran 2022.

h) Piutang Lainnya **Rp 00,00****(1) Piutang Pengelolaan Kekayaan Daerah** **Rp 00,00**

Jumlah tersebut merupakan nilai sewa tanah yang belum dibayar atas tanah milik daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga

(2) Piutang Deviden **Rp 00,00**

Jumlah di atas adalah Piutang Deviden dengan rincian sebagai berikut :

-	Rp	00,00
Jumlah	Rp	00,00

	Tahun 2022	Tahun 2021
i) Persediaan	Rp. 33.742.035.994,20	Rp 248.297.247.215,78
Terdiri dari :		
- Persediaan Hibah	Rp 33.742.035.994,20	Rp. 237.605.918.942,20
- Persediaan barang habis pakai per 31 Desember 2022	yang terdiri dari :	
- Rincian	Tahun 2022	Tahun 2021
Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp 2.132.776,20	Rp. 1.068.500,00
- Persediaan Cetakan/foto copy/cetak foto/penjilidan	Rp 0,00	Rp. 0,00
- Persediaan bahan bakar BBM	Rp 0,00	Rp. 0,00
- Alat bahan untuk kegiatan kantor – bahan cetak	Rp 310.000,00	Rp. 1.695.750,00
- Alat bahan untuk kegiatan kantor lainnya	Rp 0,00	Rp. 38.750,00
- Hibah Barang	Rp 2.123.112.568,00	Rp. 0,00
- Peralatan Kebersihan Kantor Bahan Komputer	Rp 166.500,00	Rp. 0,00
- Alat bahan untuk kegiatan kantor perabot kantor	Rp 111.000,00	Rp. 89.000,00
Alat bahan untuk kegiatan kantor benda pos	Rp 100.000,00	Rp. 120.000,00
- Persediaan Bahan Baku	Rp 68.621.150,00	Rp. 298.487.660,00
Jumlah	Rp 33.742.035.994,20	Rp. 301.499.660,00

Terdapat perbedaan Nilai persediaan yang tercatat di pengurus barang karena belum tercatat sebesar Rp. 2,123.112.568,00 yang merupakan Hibah barang kepada pemerintah pusat

2) ASET TETAP

	Tahun 2022	Tahun 2021
Aset Tetap	Rp. 4.774.399.781.212,22	Rp. 4.789.119.180.910,64

Aset tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 yang terdiri dari :

	TAHUN 2022	TAHUN 2021
a Tanah.	Rp. 1.281.855.799.626,00	Rp. 1.258.148.031.626
Saldo tanah terinci sebagai berikut :		
Mutasi Tanah		
Saldo Awal	Rp. 1.258.148.031.626,00	Rp. 1.230.383.608.626,00
Penambahan	Rp. 23.707.768.000,00	Rp. 27.764.423.000,00
Pengurangan	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Saldo Akhir	Rp. 1.281.855.799.626,00	Rp. 1.258.148.031.626,00

Penambahan Tanah dengan rincian sebagai berikut :

	Tahun 2022	Tahun 2021
- B.Pengadaan Tanah	Rp 23.707.768.000,00	Rp 0,00
- Nilai Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak Atas Tanah	Rp 0,00	Rp 0,00
- Mutasi antar OPD	Rp 0,00	Rp 0,00
- Mutasi antar OPD	Rp 0,00	Rp 0,00

(hasil sensus)				
- Reklas dari asset lainnya	Rp	0,00	Rp	0,00
Jumlah	Rp	23.707.768.000,00	Rp	0,00

Pada Tahun Anggaran 2022 penambahan nilai dari Belanja Modal Tanah dari pengadaan sebesar 23.707.768.000,00 . Sedangkan pada tahun anggaran 2021 tidak ada ada pengadaan tanah atau penambahan nilai tanah

Pengurangan Tanah dengan rincian sebagai berikut

	<u>Tahun 2022</u>		<u>Tahun 2021</u>	
- Double catat hasil sensus	Rp	0,00	Rp	0,00
- Reklas ke Aset Lainnya	Rp	0,00	Rp	0,00
- Hibah	Rp	0,00	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00	Rp	0,00

	<u>Tahun 2022</u>		<u>Tahun 2021</u>	
b) Jalan, Jaringan & Instalasi	Rp	3.107.910.376.087,70	Rp	3.087.879.681.124,94
Dengan Rincian	Rp		Rp	
(1) Jalan dan Jembatan	Rp	2.238.933.832.389,01	Rp	2.220.444.639.511,01
(2) Bang. Air, Jar, irigasi	Rp	753.800.344.973,69	Rp	754.850.850.722,93
(3) Instalasi	Rp	28.459.982.372,00	Rp	28.459.982.372,00
(4) Jaringan	Rp	86.716.216.353,00	Rp	84.124.208.519,00

Mutasi Jalan, Jaringan dan Instalasi adalah sebagai berikut:

	<u>Tahun 2022</u>		<u>Tahun 2021</u>	
Saldo Awal	Rp	3.087.879.681.124,94	Rp	3.077.910.752.201,19
Koreksi tambah saldo awal	Rp	0,00	Rp	0,00
Koreksi kurang saldo awal	Rp	0,00	Rp	0,00
Saldo awal setelah koreksi	Rp	0,00	Rp	0,00
Penambahan	Rp	22.363.146.820,48	Rp	10.524.360.092,75
Pengurangan	Rp	2.332.451.857,72	Rp	555.431.169,00
Saldo Akhir	Rp	3.107.910.376.087,70	Rp	3.087.879.681.124,94

Penambahan Jalan, Jaringan dan Instalasi Tahun 2022 sebesar Rp. 22.363.146.820,48 dan Tahun 2021 sebesar Rp. 10.524.360.092,75 berasal dari :

	<u>Tahun 2022</u>		<u>Tahun 2021</u>	
B. Modal Tahun 2021	Rp	0,00	Rp	9.527.441.061,40
Pengadaan Tahun 2021 (LRA)	Rp	22.363.146.820,48		
Non Belanja Modal 2021	Rp	0,00	Rp	315.420.453,00
Penyesuaian Belanja Modal	Rp	0,00	Rp	0,00
Mutasi Antar KIB (dari KIB F)	Rp	0,00	Rp	147.520.560,00
Mutasi Antar KIB (dari KIB C)	Rp	0,00	Rp	533.978.018,35
Kegiatan Luncuran				
Jumlah	Rp	22.363.146.820,48	Rp	10.524.360.092,75

Pengurangan Jalan, Jaringan dan Instalasi tahun 2022 sebesar Rp. 2.332.451.857,72

Dan Tahun 2021 sebesar Rp. 555.431.169,00 berasal dari :

	<u>Tahun 2022</u>		<u>Tahun 2021</u>	
Mutasi antar OPD	Rp	2.332.451.857,72	Rp	506.550.000,00
Pembayaran BMD	Rp	0,00	Rp	0,00

(Hutang Tahun 2018)			
Penyesuaian Belanja Modal	Rp	0,00	Rp 0,00
Mutasi Antar KIB	Rp	0,00	Rp 0,00
Jurnal koreksi BPK	Rp	0,00	Rp 0,00
Reklas ke Aset Lainnya (Hibah)	Rp	0,00	Rp 48.881.169,00
Jumlah	Rp	2.332.451.857,72	Rp 555.431.169,00

	Tahun 2022		Tahun 2021	
c) Gedung dan Bangunan	Rp.	34.861.820.201,40	Rp.	278.734.338.525,67
Terdiri dari				
(1) Bangunan Gedung	Rp.	30.646.340.634,29	Rp.	275.176.269.076,67
(2) Monumen	Rp.	64.817.409,29	Rp.	0,00
(3) Tugu Titik Kontrol/Pasti	Rp.	4.150.662.157,82	Rp.	3.558.069.449,00
Jumlah	Rp.	34.861.820.201,40	Rp.	278.734.338.525,67
Mutasi Bangunan				
Saldo awal	Rp.	278.734.338.525,67	Rp.	307.440.552.746,32
Koreksi tambah saldo awal	Rp.	0,00	Rp.	58.017.731,66
Koreksi kurang saldo awal	Rp.	0,00	Rp.	0,00
Saldo Awal setelah koreksi	Rp.	0,00	Rp.	307.498.570.477,98
Penambahan	Rp.	4.499.741.756,52	Rp.	43.968.580.321,56
Pengurangan	Rp.	248.372.260.080,79	Rp.	72.732.812.273,87
Saldo Akhir	Rp.	34.861.820.201,40	Rp.	278.734.338.525,67

Penambahan Bangunan Gedung Tahun 2022 sebesar Rp 4.499.741.756,52 dan Tahun 2021 sebesar Rp 43.968.580.321,56

berasal dari :

	Tahun 2022		Tahun 2021	
- B.Modal Tahun 2022	Rp.	4.499.741.756,52	Rp	30.664.440.359,00
- Non Belanja Modal	Rp.	0,00	Rp	383.750.232,00
- Mutasi antar OPD	Rp.	0,00	Rp	0,00
- Mutasi antar KIB	Rp.	0,00	Rp	0,00
Mutasi antar KIB(dari KIB F)	Rp.	0,00	Rp	12.920.389.730,56
- Koreksi tambah saldo awal	Rp.	0,00	Rp	0,00
- Tambahan nilai untuk kekurangan progress fisik Hibah	Rp	0,00	Rp	0,00
Jumlah	Rp.	4.499.741.756,52	Rp	43.968.580.321,56

Pengurangan Tahun 2022 sebesar Rp. 248.372.260.080,79 dan pengurangan Tahun 2021 sebesar Rp. 72.732.812.273,87

Berasal dari

	Tahun 2022		Tahun 2021	
- Reklas KIB C ke Aset Lainnya	Rp.	95.477.509,00	Rp.	0,00
- Mutasi antar OPD	Rp.	248.276.782.571,79	Rp	62.330.928.298,96

-	Jurnal koreksi BPK	Rp.	0,00	Rp.	0,00
-	Kebih catat progress fisik	Rp.	0,00	Rp.	9.368.125,56
-	Mutasi Antar KIB(ke KIB B)	Rp.	0,00	Rp.	9.379.918.999,00
-	Mutasi Antar KIB(ke KIB D)	Rp.	0,00	Rp.	533.978,018,35
-	Mutasi Antar KIB ke Aset lainnya	Rp.	0,00	Rp.	478.618.831,00
	Jumlah	Rp.	248.372.260.080,79	Rp.	72.732.812.273,87
d)	Peralatan dan Mesin	Rp.	66.518.925.188,94	Rp.	96.673.589.049,23

No.	Rincian		Tahun 2022		Tahun 2021
	Alat-alat Besar	Rp.	46.288.555.968,10	Rp.	43.563.341.617,10
	Alat-alat Angkutan	Rp.	10.219.602.450,00	Rp.	10.170.102.450,00
	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp.	331.014.000,00	Rp.	341.722.500,00
	Alat-alat Pertanian	Rp.	251.926.000,00	Rp.	251.926.000,00
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp.	3.543.662.842,82	Rp.	32.536.148.015,55
	Alat studio dan Komunikasi	Rp.	467.727.500,00	Rp.	4.955.273.750,00
	Alat-alat kedokteran	Rp.	14.272.599,00	Rp.	341.055.078,55
	Alat Laboratorium	Rp.	2.576.843.560,00	Rp.	2.576.843.560,00
	Komputer	Rp.	2.421.259.368,02	Rp.	1.652.956.828,02
	Alat Keselamatan Kerja	Rp.	1.554.000,00	Rp.	0,00
	Peralatan proses produksi	Rp.	0,00	Rp.	77.712.250,00
	Rambu-Rambu	Rp.	206.507.000,00	Rp.	206.507.000,00
	Peralatan Olah Raga	Rp.	196.000.000,00	Rp.	0
	Jumlah	Rp.	66.518.925.188,94	Rp.	96.673.589.049,23

Mutasi Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:	Tahun 2022	Tahun 2021
Saldo Awal	Rp. 96.673.589.049,23	Rp. 99.658.245.990,90
Saldo Awal setelah Koreksi	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Penambahan	Rp. 5.464.736.397,52	Rp. 9.698.173.999,00
Pengurangan	Rp. 35.619.400.257,79	12,682.830.940,67
Saldo Akhir	Rp. 66.518.925.188,94	Rp. 96.673.589.049,23

Penambahan Peralatan dan Mesin Tahun 2022 sebesar Rp. 5.464.736.397,52 dan Tahun 2021 sebesar Rp. 9.698.173.999,00 berasal dari

	Tahun 2022	Tahun 2021
- Pengadaan/pembelian (B.Modal LRA)	Rp. 4.475.187.335,00.	Rp. 318.255.000,00.
- Penyesuaian Belanja Modal	Rp. 904.443.800,00	Rp. 38.557.700.119,65
- Mutasi antar OPD	Rp. 85.105.262,50	Rp. 70.747.761,00
- Mutasi antar OPD (Sensus BMD)	Rp. 0,00	Rp. 0,00
- Incinerator	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Reklas dari KIB C	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 5.464.736.397,52	Rp. 72.175.643.870,75

Pengurangan Peralatan dan Mesin Tahun 2022 sebesar Rp. 35.619.400.257,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp. 12,682.830.940,67

berasal dari:

		<u>Tahun 2022</u>		<u>Tahun 2021</u>	
Mutasi antar OPD	Rp.	35.617.475.257,79	Rp.	0,00	
Barang Ekstracompatable	Rp.	1.925.000,00	Rp.	0,00	
Pembayaran BMD (yang terhutang Tahun 2018)	Rp.	0,00	Rp.	0,00	
Mutasi antar OPD (Sensus OPD)	Rp.	0,00	Rp.	12.452.796.890,67	
Reklas ke Aset Lainnya (rusak berat Usulan Penghapusan	Rp.	0,00	Rp.	115.334.050,00	
Reklas ke Aset Lainnya Usulan Hibah	Rp	0,00	Rp.	114.700.000,00	
Jumlah	Rp.	35.619.400.257,79	Rp.	12,682.830.940,67	

		<u>Tahun 2022</u>		<u>Tahun 2021</u>	
e) Aset Tetap Lainnya		RP 13.916.164.652,14		Rp. 13.559.802.652,14	
(1) Buku dan Perpustakaan		Rp 13.916.164.652,14		Rp. 13.559.802.652,14	
(2)Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan/olah raga	Rp	0,00	Rp.	0,00	
(3)Hewan, ternak sertaTanaman	Rp	0,00	Rp.	0,00	
Mutasi Aset Tetap Lainnya adalah sebagai					
Saldo Awal	Rp.	13.559.802.652,14	Rp.	13.023.233.699,71	
Koreksi Kurang Saldo awal	Rp.	0,00	Rp.	0,00	
Saldo Awal Setelah Koreksi	Rp.	0,00	Rp.	0,00	
Penambahan	Rp.	356.362.000,00	Rp.	566.408.539,00	
Pengurangan	Rp	0,00	Rp.	29.839.586,57	
Saldo Akhir	Rp	13.916.164.652,14	Rp.	13.559.802.652,14	

Penambahan Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 terdiri atas :

		<u>Tahun 2022</u>		<u>Tahun 2021</u>	
- Pengadaaan/pembelian (Belanja Modal/ LRA)	Rp	0,00	Rp	0,00	
- Belanja Non Modal	Rp.	0,00	Rp	566.408.539,00	
- Mutasi antar OPD (Sensus)	Rp	0,00	Rp	0,00	
- Penyesuaian B. Modal	Rp.	0,00	Rp	0,00	
- Reklas dari Persediaan	Rp.	356.362.000,00	Rp	0,00	
Jumlah	Rp	356.362.000,00	Rp	566.408.539,00	

Pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 sebesar 0,00 dan Tahun 2021 sebesar 29.839.586,57 berasal dari :

	Tahun 2022		Tahun 2021	
- Mutasi Antar OPD	Rp.	0,00	Rp	29.839.586,57
- Mutasi antar KIB	Rp.	<u>0,00</u>	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah	Rp.	0,00	Rp	29.839.586,57

	Tahun 2022		Tahun 2021	
F). Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp.	269.336.695.456,04	Rp.	16.915.838.801,04

Jumlah tersebut merupakan konstruksi yang masih dalam pengerjaan terdiri dari:

	Tahun 2022		Tahun 2021	
Konstruksi dlm pengerjaan	Rp.	286.466.896.180,04	Rp	16.915.838.801,04
Jumlah	Rp.	<u>286.466.896.180,04</u>	Rp.	<u>16.915.838.801,04</u>

Mutasi Konstruksi dalam pengerjaan adalah sebagai berikut :

	Tahun 2022		Tahun 2021	
Saldo awal	Rp.	16.915.838.801,04	Rp.	29.983.749.091,60
Penambahan	Rp	269.699.200.379,00	Rp.	0,00
Pengurangan	Rp.	148.143.000,00	Rp.	13.067.910.290,56
Saldo akhir	Rp.	286.466.896.180,04	Rp.	16.915.838.801,04

Penambahan Konstruksi dalam pengerjaan Tahun 2022 sebesar Rp 269.699.200.379,00 Tahun 2021 sebesar Rp 0,00 berasal dari :

	Tahun 2022		Tahun 2021	
- Penyesuaian Belanja Modal (LRA KIB C)	Rp	249.634.590.053,00	Rp	0,00
- Penyesuaian Belanja Modal (LRA KIB D)	Rp	665.457.242,00	RP	0,00
- Tambahan KDP tahun 2022	Rp.	17.130.200.724,00	RP	0,00
- Non Belanja Modal	Rp.	2.468.952.360	Rp.	0,00
- Jumlah	Rp.	269.699.200.379,00	Rp	16.915.838.801,04

Ada perbedaan nilai pada Konstruksi Dalam Pekerjaan sebesar Rp. 17.130.200.724,00 dengan yang tercatat di Pengurus Barang karena belum tercatat pada pengurus barang

Pengurangan Konstruksi dalam pengerjaan Tahun 2022 Rp. 148.143.000,00 dan Tahun 2021 Rp. 13.067.910.290,56 berasal dari :

		Tahun 2022		Tahun 2021
- Mutasi antar KIB (KIB C)	Rp.	0,00	Rp.	12.920.389.730,56
- Mutasi antar KIB (KIB D)	Rp.	148.143.000,00	Rp.	147.520.560,00
- Mutasi antar OPD	Rp.	0,00	Rp.	,00
Jumlah	Rp.	148.143.000,00	Rp.	13.067.910.290,56

Jumlah Aset Tetap pada Tahun 2022 sebesar Rp. 4.774.399.781.212,22 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp. 2.145.458.927.475,02 sehingga nilai Aset tetap setelah akumulasi penyusutan sebesar Rp. 2.628.940.853.737,20 . Sedangkan Jumlah Aset tetap pada tahu 2021 sebesar Rp. 4.751.911.281.779,02 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp. 2.001.846.006.272,06 sehingga nilai Aset tetap setelah akumulasi penyusutan sebesar Rp. 2.750.065.275.506,96

	Tahun 2022	Tahun 2021
3) ASET LAINNYA	Rp. 7	Rp. 435.723.866.299,97

Aset lainnya terdiri dari: 435.067.858.808,9

a) Tagihan Penjualan Angsuran Jangka Panjang Rp 00,00

Jumlah tersebut merupakan bagian penjualan angsuran yang akan jatuh tempo pada jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran ke depan, dengan rincian sebagai berikut :

- Piutang Penjualan Angsuran Cicilan Kendaraan Bermotor	Rp	0,00
- Piutang Angsuran Leasing Traktor	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00

b) Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp. 00,00

Jumlah tersebut merupakan nilai aktiva tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung per tanggal 31 Desember 2022 yang dikerjasamakan pengelolaannya kepada pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut:

- BOT Produktif	Rp	0,00
- BOT Tidak Produktif	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00

c) Tuntutan Ganti Rugi Rp 00,00

Jumlah tersebut merupakan bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang akan jatuh tempo pada jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran ke depan.

d) Aset Tidak Berwujud Tahun 2022 Tahun 2021
Rp.68.543.000,00 Rp. 68.543.000,00

Terdiri dari :

- Aset tidak berwujud Rp.68.543.000,00 Rp. 68.543.000,00

Aset tidak berwujud terdiri dari :

-WEB Database kebinamargaan

bmair.badungkab.go.id Rp. 68.543.000,00 Rp. 68.543.000,00

-Sistem informasi Bantuan Teknis

Bidang Pengairan Rp. 0,00 Rp. 0,00

Jumlah Aset Tidak Berwujud Rp. 68.543.000,00 Rp. 68.543.000,00

Nilai Aset Tidak Berwujud sebesar Rp. 68.543.000,00 merupakan aset tidak berwujud pengadaan tahun sebelumnya.

e) Aset lain-lain di atas terdiri dari

	Tahun 2022	Tahun 2021
- aset kondisi Rusak Berat	Rp. 434.999.315.808,97	Rp. 435.655.323.299,97
Jumlah	Rp. 434.999.315.808,97	Rp. 435.655.323.299,97

KEWAJIBAN	Tahun 2022	Tahun 2021
	Rp.19.256.359.588,00	Rp. 3.223.922,00

Terdiri dari

Kewajiban Jangka	Rp. 19.256.359.588,00	Rp. 3.223.922,00
------------------	-----------------------	------------------

Pendek

a. Utang PFK	Rp	0,00	Rp.	0,00
b. Utang jangka pendek lainnya	Rp	0,00	Rp.	0,00
c. Kewajiban untuk di konsolidasikan	Rp	0,00	Rp.	0,00
d. Utang beban	Rp	2.126.158.864,00	Rp.	3.223.922,00
Utang beban terdiri				
d.1 Utang Barang dan Jasa terdiri dari :	Rp	2.126.158.864,00	Rp	3.223.922,00
d.1.1 Utang telp, listrik dan air		3.046.296,00		3.223.922,00
- Utang Telepon	Rp	500.538,00	Rp	463.169,00
- Utang Air	Rp	435.125,00	Rp	510.915,00

-	Utang Listrik	Rp	2.110.633,00	Rp	2.249.838,00
d.1.2	Barang dan Jasa	Rp	2.123.112.568,00		0,00
d.2	Utang Belanja Pegawai	Rp	0,00	Rp	0,00
E	Utang B. Modal	Rp	17.130.200.724,00		0,00

5.2.3 EKUITAS DANA

Tahun 2022

Tahun 2021

1) Ekuitas Dana Rp. 5.258.213.717.875,39 3.380.384.192.197,57

Jumlah tersebut merupakan kekayaan bersih Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung yang bersifat lancar per tanggal 31 Desember 2022 yang dikelola oleh SKPD, yang merupakan selisih antara jumlah nilai aset dengan jumlah nilai kewajiban.

Dengan perhitungan sebagai berikut :

		Tahun 2022		Tahun 2021	
a	Piutang pendapatan	Rp	0,00	Rp	0,00
b	Persediaan	Rp	33.742.035.994,20	Rp	238.518.479.877,20
c	Beban dibayar dimuka	Rp	0,00	Rp	0,00
d	Aset tetap	Rp	2.646.071.054.461,20	Rp	2.750.065.275.506,96
e	Aset Lainnya	Rp	381.325.318.502,27	Rp	382.024.893.397,27
f	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek	Rp	(19.256.359.588,00)	Rp	(3.223.922,00)
	Jumlah ekuitas	Rp	3.041.882.049.369,67	Rp	3.370.607.061.325,98

Bab VI

Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

- *Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung*
- *Alamat : Jalan Raya Sempidi Mengwi - Badung*
- *Telepon : 0361 – 9009401*
- *Jumlah Pegawai berdasarkan golongan, pangkat, eselon, CPNS & tenaga harian lepas.*

Jumlah Karyawan seluruhnya : 316 orang.

PNS = 112 orang

THL = 3 orang.

Kontrak = 201 orang

Jumlah Pejabat eselon : 24 orang.

Eselon II/b: 1 orang.

Eselon III/a: 1 orang.

Eselon III/b: 5 orang.

Eselon IV/a: 2 orang.

Jafung : 15

Jumlah PNS : 112 orang

S2 : 18 orang

S1 : 64 orang

D III : -

SMA : 25 orang

STM : 6 orang

SMEA : 1 orang

SMKI : 1 orang

Paket C : 3 orang

SMP : 1 orang

SD : - orang

Paket B : - orang

Gol. IV : 12 orang

- Gol. IV/c : 1 orang
- Gol. IV/b : - orang
- Gol. IV/a : 11 orang

Gol. III : 74 orang

- Gol III/d : 24 orang
- Gol III/c : 19 orang
- Gol III/b : 4 orang
- Gol III/a : 27 orang

Gol II : 31 orang

- Gol II/d : 18 orang
- Gol II/c : 4 orang
- Gol II/b : 4 orang
- Gol II/a : 5 orang

Gol. I : - Orang

- Gol I/d : - orang
- Gol I/c : - orang
- Gol I/b : - orang
- Gol I/a : - orang

Jenis kelamin :

- Laki-laki = : 86 orang
- Perempuan = : 26 orang

THL : 3 Orang

Pendidikan S1 : 2 orang

SMA : 1 Orang

Jenis Kelamin :

Laki-laki : 3 Orang

Perempuan : -

Pegawai Kontrak : 205 orang

Jenis Kelamin :

Laki-laki : 160 orang

Perempuan : 45 orang

BAB VII

Kesimpulan Tentang Laporan Keuangan

Pelaksanaan APBD Tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung mendapat alokasi anggaran sebesar RP. 661.515.118.594,00 terealisasi sebesar Rp. 608.218.645.279,00 atau 91,94 % Pada tahun 2022 aset yang dikelola adalah sebesar Rp. 4.774.399.781.212,22 Nilai aset tersebut merupakan penilaian yang dilakukan oleh Tim Aset Daerah Kabupaten Badung serta melalui pengadaan yang dilakukan pada Tahun 2022.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah

1. Air drainase yang meluap karena saluran tersumbat sampah, secara menyeluruh memerlukan peningkatan penanganan lintas SKPD
2. Perlunya peningkatan koordinasi antara Struktural untuk menyatukan pola kerja menghadapi pekerjaan yang akan datang yang semakin berat.

Mangupura, 10 Januari 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Badung



Ir. Ida Bagus Surya Suamba, ST. MT
Pembina Utama Muda
NIP. 197209161997031004

LAMPIRAN